

Judul : Jadi ketua komisi XII DPR, Mekeng siap kawal isu energi hingga investasi
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Jadi Ketua Komisi XII DPR Mekeng Siap Kawal Isu Energi Hingga Investasi

FOTO: DPR GO ID



Melchias Markus

MELCHIAS Markus Mekeng resmi dilantik sebagai Ketua Komisi XII DPR RI. Mekeng menyatakan siap mengawal sejumlah isu strategis, mulai dari energi, pertambangan, lingkungan hidup hingga investasi.

Mekeng mengatakan Komisi XII DPR memiliki peran penting. Sebab, kebijakan di sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

"Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar. Komisi XII akan bekerja memastikan pengelolaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Mekeng dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Dia mengatakan salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah ketahanan energi dan reformasi subsidi energi. Dia menyoroti rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mekeng meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tersebut tak menimbulkan ketidakadilan baru. Menurutnya, data desil penting sebagai instrumen kebijakan, tetapi tak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan penerima subsidi.

"Data desil harus kita gunakan secara hati-hati. Kondisi ekonomi masyarakat tidak

selalu bisa dilihat hanya dari data administratif. Orang yang rumahnya sudah berlantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu. Karena itu, data harus diverifikasi secara faktual di lapangan," tegasnya.

Politikus Golkar ini juga meminta pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota, memastikan pendataan masyarakat dilakukan secara akurat dan dinamis. Menurutnya, petugas harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, termasuk pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kebutuhan mobilitas hingga kondisi sosial rumah tangga.

"Jangan hanya mengandalkan data dari desa atau data administratif. Petugas harus turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kalau datanya keliru, dampaknya bukan hanya pada subsidi BBM, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat," katanya.

Mekeng turut mendorong adanya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data yang mudah. Dengan begitu, masyarakat yang berhak menerima subsidi tetapi belum tercatat bisa mengajukan verifikasi dan koreksi.

Selain subsidi energi, Mekeng menyebut penguatan ketahanan energi nasional menjadi perhatian Komisi XII DPR. Dia menilai Indonesia perlu memastikan ketersediaan energi sekaligus mengurangi dampak gejolak harga energi global.

"Energi adalah urat nadi perekonomian. Kita harus memastikan pasokan energi cukup, harga terjangkau, industri mendapatkan kepastian, tetapi APBN juga tetap sehat. Ini membutuhkan kebijakan yang terukur dan konsisten," ujarnya.

Pihaknya juga akan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan kapasitas produksi energi nasional, serta penguatan infrastruktur energi dari hulu hingga hilir. ■ PYB